

Robert A. Dahl dan Studi tentang Fenomena Demokrasi di India

HUSNUL ISA HARAHAP

Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
Medan, Jl. Dr. Sofyan No.1 Medan, 20155, Telepon: 061-8211965, Email:
husnul_nul@yahoo.com

Diterima tanggal 31 Juni 2007/Disetujui tanggal 31 Juli 2007

How can explain the phenomena of Indian democracy? This study intends to answer this question. To have the use of Robert A. Dahl views and all at once criticize his views, this study also tries to explain about the secret of Indian democracy succeeded. The point is India is the poverty country and there are no one of poverty country in the world have democracy for long time. Obvious have found that democracy in India has a lot of problem. And there are indications about premise of problem Indian democracy as impact of economic variable. Mainly because Indian democracies prevalent exist adjoin with human right violation, poverty, and "jati" (the system of caste). Apiece as the abnormal fact because there are exactly "reinforce" democracy in India. Hence, in this study the term of "permissive democracy" used to describe the uniqueness of Indian democracy condition. As implication of the theories, this study argue that clarification about the phenomena of democracy at poverty state need special concept as a differing with developed countries because however there are difficulty to meaningful about democracy without economic welfares. Absolutely, democracy cannot sufficient and cannot survive without economic welfares.

Keywords: *democracy, permissive democracy, economic welfares.*

Pendahuluan

Studi tentang masalah demokrasi di India merupakan tema yang selalu menarik untuk dicermati. Hal ini disebabkan karena hampir tidak ada negara miskin di Dunia yang mampu bertahan dengan sistem pemerintahan ini. Negara tetangga India pun yakni Pakistan, tak mampu mempertahankan demokrasi. Sementara demokrasi di Nigeria yang GNP perkapitanya juga kurang dari 500 dollar pertahun, demokrasinya hanya bertahan dalam kisaran 1-9 tahun. Demikian juga demokrasi di Sudan yang bahkan tak mampu bertahan lebih dari 12 bulan (Lihat Tabel.1.).

Dalam sebuah studi tentang relasi antara status ekonomi suatu negara dan keberhasilan demokrasi, kasus India seringkali dijadikan

sebagai satu kasus yang digunakan untuk memperkuat pendapat, bahwa tidak ada relasi antara status ekonomi suatu negara dan keberhasilan demokrasi. Sementara para penganut teori yang meyakini besarnya relasi itu, menganggap bahwa fenomena di India tidak cukup mewakili fakta bahwa lebih banyak negara miskin yang tidak demokratis atau hanya menikmati demokrasi dalam waktu yang singkat.

Kenyataannya demokratis atau tidak demokratisnya suatu negara tidaklah cukup jika dilihat dan dijelaskan hanya dari satu faktor saja, yakni faktor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi China yang fantastis akhir-akhir ini telah menghentak "mata" banyak ilmuwan tentang fenomena bahwa tidak terdapat tanda-tanda kalau sistem komunis di negara itu akan run-

tuh dan berubah menjadi negara demokratis. Malahan, adakalanya keberhasilan akan pertumbuhan ekonomi China memperkuat keyakinan masyarakatnya bahwa sistem komunisme tidaklah seburuk yang pernah dikemukakan oleh kaum “demokrat”. Kondisi yang hampir sama terdapat di Malaysia dan Singapura.

Tabel 1
Negara Miskin dan Lama
Berlangsungnya Demokrasi

No.	Negara dengan GNP per Kapita 1987 (dalam dolar) Kurang dari 500	Lama Berlangsungnya Demokrasi
1	India	20 tahun lebih
2	Pakistan	10-19 tahun
3	Nigeria	1-9 tahun
4	Sudan	Kurang dari 1 tahun

Sumber: Diolah dari Huntington, (1997), hal. 348-349.

Studi ini tidak hendak melibatkan diri terlalu jauh pada perdebatan klasik tersebut. Begitupun studi ini tetap memiliki asumsi bahwa faktor ekonomi merupakan faktor yang penting bagi perkembangan demokrasi. Pada prosesnya efek dari kondisi perekonomian yang kurang baik di India, telah menggeser besaran kualitas demokrasi yang sebenarnya. India akan tetap kesulitan untuk dapat masuk pada tahap demokrasi yang lebih lanjut, dan membutuhkan banyak “negosiasi” serta penyesuaian terhadap berbagai aspek sosial-budaya-politik.

Yang ingin disampaikan dalam studi ini adalah bahwa ada faktor di luar faktor ekonomi yang mempengaruhi keberhasilan demokrasi di sebuah negara. Dalam konteks India faktor itu bisa berasal dari banyak segi. Segi-segi yang banyak tersebut terkadang bisa saling melengkapi. Tetapi tidak selamanya identik sebagai elemen yang memperkuat keberadaan demokrasi karena biasanya terdapat juga elemen-elemen yang melemahkan keberadaan demokrasi. Semua tergantung dari berbagai bentuk relasi yang bereaksi dalam elemen-elemen tersebut dan dari sudut mana pula semua relasi itu dilihat atau dikaji.

Misalnya saja Samuel P. Huntington pernah mengemukakan kalau agama Hindu lebih akomodatif terhadap demokrasi. Huntington

berpendapat, terdapat keramahan pada keanekaragaman di dalam tradisi hindu.¹ Sehingga di India yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, jarang sekali muncul tuntutan untuk mengakhiri demokrasi. Yang terjadi malah kebalikannya, tuntutan terhadap demokratisasi di India semakin menguat.

Teori ini jelas memperlihatkan bahwa penjelasan tentang keberadaan demokrasi di negara miskin dari sudut pandang yang berbeda mutlak diperlukan. Alasannya bukan hanya karena ada fenomena-fenomena khusus yang berbeda di setiap negara, tetapi juga karena satu penjelasan yang tunggal masih dirasa belum cukup memuaskan untuk menjawab pertanyaan; mengapa ada negara miskin yang “demokrasi” nya masih bertahan begitu lama?

Yang perlu digarisbawahi adalah demokrasi macam apa yang memiliki relasi dengan elemen-elemen yang mana. Karena tanpa adanya usaha tentang hal ini maka kesimpulan yang diambil justru menjadi bias. Pertama, kita melihat bahwa demokrasi yang banyak berkembang seringkali bukan merupakan demokrasi yang sebenarnya; kedua, keseimbangan teori tentang demokrasi itu dan persoalan yang melekat pada demokrasi ketika diterapkan adalah dua hal yang perlu dikemukakan; dan terakhir, kesalahan dalam memformulasikan kondisi demokrasi yang ada di sebuah negara akan menyebabkan munculnya kesalahan lanjutan yakni dalam menempatkan elemen-elemen yang mempengaruhinya.

Studi ini hendak melihat keunikan negara India yakni sebagai sebuah negara miskin yang paling konsisten dengan demokrasi. Pertanyaannya adalah mengapa ada negara miskin yang “demokrasi”nya masih bertahan begitu lama? Padahal jika hendak melihat lebih jauh tentang India ada banyak hal yang kita temukan yang semakin menyebabkan kita menjadi lebih sulit untuk mempercayai fenomena itu. Tentu yang paling jelas adalah tentang kemiskinan, sehingga dalam studi ini nantinya akan ada komentar tentang dimana faktor

¹ Samuel P. Huntington, “Prospek Demokrasi”, dalam Roy C. Macridis, *Perbandingan Politik: Catatan dan Bacaan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992), hal. 94.

ekonomi “diletakkan” dalam konteks relasinya dengan demokrasi di India.

Pendekatan dan Metode

Studi ini menggunakan kombinasi pendekatan sistem politik dan budaya politik dan perilaku politik. Studi ini menggunakan pandangan Robert A. Dahl. Tujuannya bukan hendak menempatkan perspektif teoritis Dahl sebagai perspektif utama dalam melihat demokrasi di India. Melainkan hanya sebagai pisau analisa bantu yang “lunak”, yang justru hendak diuji kembali. Studi ini hendak mempertanyakan kembali “apakah pandangan-pandangan Dahl tentang demokrasi di India merupakan pandangan yang tepat”? Sehingga sebenarnya fokus studi ini ditujukan pada fenomena negara India pada masa sebelum dan akhir-akhir tahun 80-an.

Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan dokumen. Tidak dapat dibantah kalau terdapat banyak ilmuwan politik yang bercerita tentang demokrasi di India dan Robert A. Dahl hanya salah satunya saja. Pilihan terhadap Dahl justru didorong oleh adanya “ketegasan” Dahl yang telah “mengatakan” bahwa demokrasi di India bersifat untung-untungan.² Mungkin pula kalau ini merupakan salah satu alasan mengapa Dahl memberi sub-judul yang ditulisnya tentang masalah India dan demokrasi, dengan judul; “India: Demokrasi yang Tidak Mungkin”.

Pilihan terhadap Dahl juga karena Ia merupakan ilmuwan yang cukup konsisten “membidangi” demokrasi. Ia seringkali disebut sebagai ilmuwan politik yang memiliki pandangan yang cukup baik tentang demokrasi. Dahl mengatakan bahwa demokrasi selalu merupa-

² Menurut Dahl demokrasi bisa bersifat untung-untungan (hal. 223) manakala disebuah negara tidak memiliki satu atau beberapa dari lima kondisi yang baik bagi demokrasi. Adapun kelima kondisi tersebut, yakni; (1).pengawasan militer dan ke-polisian oleh pejabat-pejabat yang terpilih; (2).ke-yakinan demokrasi dan kebudayaan politik; (3).tidak ada kontrol asing yang memusuhi demokrasi; (4).masyarakat dan ekonomi pasar yang modern; (5).pluralisme subkultural yang lemah. Lihat Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, terj. A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 200.

kan proses dan membutuhkan perbaikan-perbaikan. Dan buat Dahl jurang perbedaan antara demokrasi ideal dan demokrasi yang nyatalah yang nantinya akan menentukan masa depan demokrasi.

Tentang Kemiskinan di India

Wilayah India yang luas sering disebut setara dengan besarnya masalah yang harus dihadapinya.³ Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk India yang sangat banyak, yakni mencapai tak kurang dari 1 miliar dan melebihi jumlah akumulasi penduduk di Asia Tenggara. Jumlah ini menjadi sebuah problem besar manakala didapati lebih dari separuhnya hidup di bawah garis kemiskinan. Munculnya problem ini ternyata diakibatkan oleh tidak seimbangnya kontinuitas relasi antara luas wilayah dan jumlah penduduk. Kalau dilihat taraf kehidupan di India, maka dari tahun 1981-1995 setengah dari penduduk India hidup dengan biaya tidak lebih dari US\$ 1 dollar/hari. Dan bahkan sampai tahun 1996, India menempati urutan ke-47 dalam suatu indeks kemiskinan dunia (*Human Proverty Index*) setelah Rwanda yang berada di urutan ke-48. Tingkat pendidikan juga sangat rendah karena lebih dari 60% penduduk perempuan yang berusia 6 tahun menderita buta huruf.⁴ Belum lagi jumlah angka kematian bayi masih belum bisa dikurangi secara maksimal.

Tabel 2
Kesejahteraan di India

Identifikas	Skor
Angka harapan hidup pada kelahiran, 1990 (tahun)	59.1
Angka melek huruf orang dewasa, 1985 (%)	44.1
Tahun masuk sekolah, 1980	2.2
Angka kematian anak dibawah lima tahun, (per 1000) ppp	154
Peringkat indeks Human Development	0.308

³ Salah satu ilmuwan yang mengemukakan ini adalah Myron Weiner. Myaron Weiner, “Politik di Asia Selatan”, dalam Yahya Muhaimin, *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*, (Yogyakarta: Gajah Mada Uni-versity Press, 1978), hal. 141.

⁴ Dahl, 2001, *Ibid.*, hal. 217-219. Lihat juga, Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya: Jilid II*, terj. A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hal. 66.

Catatan: *Human Development Index* (HDI) terdiri dari tiga indikator: harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan. Untuk setiap indikator, *a world wide maximum* dan minimum diidentifikasi, dan kemudian setiap negara diranking berdasarkan ketiga indikator tersebut. Gabungan rata-rata dari ketiga posisi tersebut adalah HDI: semakin dekat ke angka 1, semakin baik peringkatnya. Sumber: Sorensen (2004), hal., 133.

Kita bisa membayangkan bahwa dalam kondisi masyarakat yang begitu besar, untuk dapat bertahan hidup masyarakat India masih harus berkompromi dengan alam yang tak begitu ramah. “Duapertiga dari penduduk menggantungkan hidupnya dari tanah kurang dari satu acre bagi setiap penduduk desa”.⁵ Sementara kita mengetahui bahwa kebanyakan tanah di India bukanlah tanah yang subur. Ditambah dengan musim panas yang seringkali muncul dalam waktu berkepanjangan.

Masyarakat India yang sangat majemuk menggambarkan rawannya konflik yang bisa segera muncul akibat persoalan-persoalan ekonomi tadi. Besar kemungkinan kalau kekayaan akan keanekaragaman sosial dibentuk oleh perpecahan konsentrasi penduduk akan akses terhadap sumber-sumber kebutuhan hidup. Setidaknya dalam catatan Robert Dahl,⁶ di India terdapat 22 ribu dialek yang berbeda. India bahkan tidak memiliki bahasa nasional yang tunggal karena konstitusinya mengakui 15 bahasa. Dalam catatan lain A. H. Somjee⁷ bahkan mengatakan ada kira-kira 20 bahasa yang diakui di India.

Dahl telah mengakui bahwa “sistem kasta juga masih berlaku sebagai manifestasi kuatnya hinduisme sejak 1500 SM”.⁸ Namun yang penting dari sistem kasta ini adalah biasanya terlihat bahwa mereka yang berada pada kasta yang lebih rendah adalah mereka yang merupakan kelompok masyarakat mis-

kin. Hal ini disebabkan karena kasta itu seringkali menggambarkan dan membentuk struktur ekonomi masyarakat.

Pelanggaran terhadap hak-hak dasar masyarakatnya terlihat masih terus berlangsung dan tindakan korupsi yang dilakukan pejabat pemerintahan di India sangat besar dan terus menerus terjadi.⁹ Semua ini melengkapi kompleksnya persoalan kemiskinan di India. Keberhasilan kebijakan politik di Indiapun “terseret” seolah-olah tak hanya harus mampu tertumpu pada titik persoalan ekonomi semata. Melainkan tersebar pada aspek-aspek yang terpaut satu sama lain dalam haluan yang sama.

Tidak dapat dibantah kalau apa yang terjadi dengan India merupakan sebuah keunikan yang tiada tara. India merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia setelah China. Namun semua tantangan dan kondisi yang sering dianggap menghalangi kemunculan demokrasi ternyata dapat berlalu begitu saja. Singkatnya, sekali lagi meskipun telah dikatakan bahwa dalam banyak hal India dianggap tidak memiliki kondisi yang mendukung demokrasi, dalam kenyataannya India justru dapat tetap mempertahankan lembaga-lembaga demokrasi dalam waktu yang cukup lama.

Permissive: Wajah Demokrasi India

Demokrasi di India adalah demokrasi yang muncul dari atas. Namun bukan dari kalangan borjuis seperti yang terjadi pada negara-negara Eropa. Demokrasi India, menurut Georg Sorensen¹⁰ adalah demokrasi yang dicapai melalui koalisi antara elit dominan dengan tiga kelompok utama; (1).profesional perkotaan, yang membangun gerakan kongres 1885; (2).komunitas pengusaha India dalam bidang Industri dan perdagangan, dan; (3).-para pemilik tanah di pedesaan (elit desa).

⁵ Weiner, *loc.cit.*

⁶ *Ibid.*

⁷ A. H. Somjee, “Western Democratic Theories and Non-Western Democratic Experiences: India”, dalam Howard J. Wiarda, *Comparative Democracy and Democratization*, (USA: Wadsworth Gro-up, 2004), hal. 107.

⁸ Dahl, 2001, *loc.cit.* Lihat pula Robert W. Stern, *Changing India: Bourgeois Revolution on the Subcontinent*, (New York: Cambridge University Press, 2003), hal. 56-87.

⁹ Dahl, *Ibid.*

¹⁰ Penjelasan Sorensen cukup membantu memahami demokrasi India meski terlihat memiliki keterbatasan dan kurang memuaskan. Tentang proses terbentuknya demokrasi India yang dijelaskan oleh Sorensen, lihat Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 147.

Sebagai dampaknya, jika merujuk pada pandangan seorang ilmuwan politik seperti Samuel P. Huntington¹¹ bahwa model transformasi demokrasi seperti ini (transformasi) seringkali hanya menumbuhkan bentuk demokrasi yang terbatas. Tetapi kelebihanannya adalah bahwa bentuk negosiasi elit ini telah mendahului meledaknya partisipasi politik. Dikatakan kelebihan karena kondisi ini merupakan kondisi yang ideal dalam konteks transisi politik di negara-negara berkembang.

Dalam pandangan ilmuwan politik seperti Wolfgang Merkel,¹² demokrasi India masuk ke dalam kategori gelombang kedua. Keterbatasan dari demokrasi yang terbentuk biasanya lebih disebabkan oleh kuatnya kepentingan elit yang diuntungkan. Di tambah dengan munculnya anomali-anomali. Suka atau tidak pada akhirnya semua ini lebih sering berdampak pada proses penguasaan sumberdaya ekonomi-politik ditangan elit. Sementara, demokrasi masih tidak memperlihatkan tanda-tanda akan memberikan hasil yang diharapkan dan berjalan tanpa ada kepastian kapan akan berubah menjadi lebih baik.

Pada awal-awal demokrasi di India, Partai Kongres memainkan peranan yang cukup penting. Partai ini berhasil mengakomodasi banyak kelompok yang plural. Partai Kongres juga telah berhasil mengawal terjadinya transisi di India tak kurang dari 25 tahun. Dan berperan sebagai partai yang memelopori gerakan kemerdekaan nasional. Sebagaimana yang dicatat Juan J. Linz,¹³ di”tangan”

partai ini solusi tentang problem keanekaragaman dalam bentuk negara federal telah diputuskan.

Riwayat partai ini tidak lama oleh karena sejak ditinggalkan oleh Nehru ternyata popularitas partai semakin mengalami penurunan. Munculnya partai-partai baru dan terpecahnya personal partai memperburuk kekokohan partai kongres, sehingga lama kelamaan partai ini “tersisihkan”. Hasil pemilu tahun 1989 telah menggambarkan bahwa tidak terdapat satu partaipun yang mampu mendominasi suara pemilih dalam pemilu. Inilah awal dari pola “kepartaian banyak” di India. Koalisi partai merupakan fenomena yang sulit dihindari dalam perjalanan politik di India kontemporer.

Ada banyak hal yang memperkuat keyakinan para ilmuwan tentang bentuk demokrasi di India yang begitu luas. Salah satunya terdapat kuota 33% kuota terhadap perempuan di parlemen. Selain itu tersedia 22% kursi parlemen yang diperuntukkan bagi warga negara berkasta rendah dan suku asli India. India merupakan satu-satunya negara demokrasi baru dengan sistem federal dengan 28 negara bagian dan 7 teritori. Hak-hak dasar warga negara diakui dan terdapat pula perlindungan hukum termasuk kepada kelompok minoritas.¹⁴

Namun keyakinan itu agak berlebihan karena kontras dari beberapa “kelebihannya“, di India terdapat hal-hal yang menggiring kita pada ruang perdebatan untuk mempertanyakan kembali, apakah India memang demokratis? Tentu tidak semudah itu untuk memulai dan mengakhiri perdebatan ini dengan kesimpulan yang lebih proporsional. Diperlukan kajian khusus yang lebih mendalam agar tidak muncul perdebatan yang lebih dahsyat.

¹¹ Samuel P. Huntington membagi proses demokratisasi dalam empat model; (1).transformasi; (2).transplacement; (3).replacement; (4).intervensi. Lihat Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal. 145.

¹² Pendapat bahwa demokrasi India merupakan gelombang kedua yang dikemukakan Merkel, mengacu pada kenyataan bahwa diberlakukannya konstitusi demokratis 1950 di India. Lihat Wolfgang Merkel, *demokrasi di Asia*, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2005), hal. 135.

¹³ Lihat Juan J. Linz, “Demokrasi, Multinasionalisme, dan Federalisme”, dalam Ikrar Nusa Bhakti (eds), *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjajah: Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*, Bandung: Mizan Media Utama, 2001), hal. 67. Terdapat para penentang Partai Kongres yakni partai Janata atau Komunis. Terdapat juga partai yang

bersaing “di negara-negara bagian tertentu seperti Akali Dal di Punjab atau All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam di Tamil Nadu dan berbagai gerakan nasionalis (Nagaland, Mizram, Sikkim) di wilayah pinggiran bagian timur yang bersaing untuk meraih kekuasaan pada tingkat Negara, menuntut didirikannya negara-negara bagian yang baru dan bahkan mendukung pemisahan.

¹⁴ Lihat Merkel., *op.cit.*, hal. 86.

Kalaupun pertanyaan tersebut ingin dijawab secara seksama tentu saja tidak dengan jawaban yang kaku - ya dan tidak. Tetapi bila kita masuk dalam model-model demokrasi yang sering dibicarakan, maka model demokrasi India merupakan model demokrasi yang bertanda kutip (“”). Model demokrasi yang bertanda kutip tersebut tersebut memiliki banyak nama dan salah satunya adalah model “demokrasi cacat”¹⁵ dari Wolfgang Merkel. Demokrasi India bukanlah merupakan bentuk demokrasi sebenarnya, karena banyak masalah yang melekat pada demokrasi itu.

Hanya saja cukup disayangkan karena istilah “demokrasi cacat” itu sebenarnya kurang pas untuk India. Merkel terlalu menggeneralisir istilah itu sampai ke India. Model demokrasi India yang lebih tepat adalah model “demokrasi *permissive*”¹⁶ karena dia (demokrasi) mengalami perkembangan dari tahun ke-tahun. Tetapi tidak banyak perubahan suasana yang diakibatkannya. Demokrasi India dikatakan “*permissive*” karena begitu “toleran” dengan kekerasan, kemiskinan dan ketidakadilan. Sementara istilah demokrasi “cacat” lebih menggambarkan fenomena dimana terdapat kekurangan demokrasi pada suatu negara dan kekurangan itu kemungkinan besar tidak akan diperbaiki.

Landasan argumentasi yang dibangun untuk hal ini, misalnya kekerasan terhadap perempuan yang tidaklah dapat dilihat sebagai bagian dari imbalanced yang sepadan terhadap terbukanya ruang partisipasi dalam bentuk kuota tersebut. Atau masalah ketidaksetaraan sosial akibat adanya warisan kebudayaan be-

rupa “kasta-kasta” atau *jati*. Kalau kita buka catatan Robert L. Hardgrave, Jr. dan Stanley A. Kochanek¹⁷ kita malah menemukan bahwa penyelenggaraan pemilu di India masih sukar dipisahkan dari praktek-praktek kekerasan. Intimidasi, penculikan sampai dengan pembunuhan selalu terjadi pada tiap-tiap masa pemilu.

Sejak mengalami kemerdekaan tahun 1947 terdapat kelompok-kelompok yang melakukan gerakan teror di India. Menurut Merkel sampai sekarang fenomena gerakan teror ini masih terus mengancam demokrasi India. Hanya saja aktifitasnya terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, seperti dinegara bagian Gujarat. Argumentasi ini bagian dari alasan yang digunakan Merkel untuk memperkuat ketepatan konsep “demokrasi cacat” tadi. Namun terlepas dari perdebatan tentang atau model konsep demokrasi mana yang paling cocok, yang jelas terdapat kesamaan pandangan bahwa sebenarnya demokrasi India merupakan demokrasi yang belum mencapai tahap demokrasi maksimal atau substansial.

Dahl: Teori Warisan Kolonial

Seperti yang telah dikemukakan, Dahl melihat kemunculan demokrasi di India sebagai sesuatu yang dimungkinkan. India memiliki keadaan yang menguntungkan bagi demokrasi sekaligus juga memiliki kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Jika dilihat se-pintas maka yang cenderung lebih banyak muncul dalam pandangan kita adalah banyaknya ketidakbatasan problem yang ada disana. Sebaliknya kalau diperhatikan secara lebih hati-hati maka sebenarnya ada hal-hal yang bisa mengurai ketidakbatasan itu.

Dahl menjelaskan demokrasi India dari pemahaman akan pentingnya peran pemerintahan kolonial Inggris. Ada pengaruh penting yang berhasil dibentuk Inggris dalam struktur masyarakat India terutama struktur politik-

¹⁵ Istilah “demokrasi cacat” yang digunakan Merkel ditujukan kepada negara-negara seperti Sri Lanka, India, Nepal, Filipina, Indonesia, Thailand, Bangladesh, dan Korea Selatan. Lihat Merkel, *ibid.*, hal. 119.

¹⁶ Inspirasi tentang istilah ini muncul dari “diskusi” empat mata tentang radikalisme dengan saudara Syamsudin (seorang wartawan senior). Ketika itu sdr. Syamsudin sempat menggunakan istilah “*permissive*” untuk menggambarkan perilaku kaum intelektual yang semakin tidak memiliki pemikiran yang kritis. Meski istilah ini hanya sebuah kata dalam bahasa Inggris - artinya “semua boleh”- tetapi menurut saya diskusi dengan sdr. Syamsudin waktu itu punya arti yang sangat besar dan merupakan sebuah kenangan yang mengesankan.

¹⁷ Robert L. Hardgrave, Jr. (dkk.), *India: Government and Politics in a Developing Nation*, (New York: Harcourt College Publisher, 2000), hal. 346. Menurut Hardgrave kekerasan pemilu di India terkadang merupakan peristiwa yang memilukan. Pada tahun 1991 tidak kurang dari 350 orang telah terbunuh. Kejadian yang sama memakan korban 150 orang pada tahun 1998.

nya. Sehingga hampir tidak muncul resistensi yang kuat terhadap sistem pemerintahan itu ketika India telah merdeka. Pertama-tama, pemerintah kolonial kolonial (Inggris) secara tidak sengaja telah membantu terbentuknya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi.¹⁸ Tumbuhnya kepercayaan ini menyebabkan keragu-raguan bahwa sistem ini akan memberikan implikasi yang negatif di kemudian hari, telah hilang.

Sejalan dengan Dahl, ilmuwan sosial seperti Thomas E. Weisskopf¹⁹ serta merta melihat bahwa sosialisme merupakan sesuatu yang mustahil bagi India dalam periode awal-awal kemerdekaannya. Landasan politik partai kongres yang berpengaruh dibawah Jawaharlal Nehru telah menjelaskan kalau partai itu juga tidak punya minat yang serius terhadap sosialisme meskipun dalam upayanya menarik simpati pemilih telah dikemukakan isu-isu sosialisme.

Kedua, militer India berkembang dan telah menegakkan sebuah kode kepatuhan kepada para pemimpin sipil yang terpilih. Dalam pandangan Dahl tradisi militer India hanya sedikit memberikan dukungan terhadap suatu kup militer. Sementara kepolisian, walaupun "korup" secara luas, bukanlah sebuah kekuatan politik yang bebas yang cakap untuk melakukan sebuah kup.²⁰ Militer sepertinya tetap merupakan kekuatan nasional India yang sebenarnya karena memiliki orientasi kesetiaan nasional yang kuat dan solid dibandingkan kepolisian yang sering terbagi dalam faksi-faksi.

¹⁸ Dahl, 2001, *op.cit.*, hal. 65.

¹⁹ Thomas E. Weisskopf, *Ketertinggalan dan Imperialisme di India*, dalam, Andrew Blowers (eds), *Ketidakteraturan, Konflik dan Perubahan*, terj. Paul Sihotang, Penerbit Universitas Indonesia, 1983, hal. 463. Pendapat Weisskopf meski berangkat dari arah studi yang berbeda melengkapi dan memperkuat pendapat Robert A. Dahl. Weisskopf dalam studinya berbicara tentang masalah kemiskinan di India dalam kaitannya dengan kebijakan pembangunan. Pembangunan di India menurutnya tidak terlepas dari masalah-masalah ketidakmerataan, konflik, dan perubahan. Namun masalah-masalah tersebut tidak terjadi dengan sendirinya. Melainkan memiliki kaitan pula dengan masalah ketergantungan ekonomi.

²⁰ Dahl, 2001, *op.cit.*, hal. 219-220.

Catatan Dahl menunjukkan kalau pada tahun 1975, Indra Gandhi (Perdana Menteri saat itu) melakukan "kudeta". Putri Jawaharlal Nehru ini telah mengumumkan keadaan darurat.²¹ Hak-hak sipil tidak diakui untuk sementara waktu. Terdapat sejumlah persitiwa penangkapan terhadap kelompok yang dinilai menentang pemerintah. Lembaga demokrasi di India digulingkan dan digantikan kediktatoran. Hanya dalam beberapa waktu keadaan sudah menjadi normal.

Hasil pemilu yang dilakukan 2 tahun kemudian (1977) menunjukkan Indra Gandhi mengalami kekalahan dalam pemilu yang adil. Selang beberapa tahun Indra Gandhi terpilih sebagai Perdana Menteri untuk kedua kalinya (1980). Hanya saja kali ini kepemimpinannya harus terhenti ditengah jalan karena mati dibunuh ditahun 1984.²² Kepemimpinan militer sama sekali tidak terlihat mempunyai ancaman-ancang untuk mengambil alih kekuasaan.

Ketiga, para pendiri India modern yang membawa India menuju kemerdekaan, membantu pembentukan konstitusi dan lembaga-lembaga politiknya semua setia pada keyakinan demokrasi. Gerakan-gerakan politik yang mereka pimpin sangat mendukung gagasan-gagasan dan lembaga-lembaga demokrasi. Menurut Dahl, dalam situasi seperti ini dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah ideologi nasional India.²³ Dan sepertinya ada kenyataan bahwa tidak terdapat penghargaan terhadap pemerintahan diktator -baik dari kalangan sipil maupun militer- oleh kebanyakan rakyat India.²⁴

Kesetiaan terhadap demokrasi dikalangan para pendiri India tidak terlepas dari latar belakang pendidikan yang dimiliki karena secara

²¹ *Ibid.* Menurut Snyder Indra Gandhi melakukan tindakan untuk melaksanakan pemerintahan darurat pada bulan Juni 1975 adalah untuk merespon terjadinya krisis Sikh. Lihat Jack Snyder, *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah*, (Jakarta: Kepustakaan Gramedia Populer, 2003), hal. 340.

²² Hardgrave, *op.cit.*, hal. 86. Pengawal pribadi Indra Gandhi yang kebetulan berasal dari kaum Sikh merasa tidak puas dengan keputusan Indira Gandhi yang memerintahkan untuk menyerang Golden Temple.

²³ Dahl, 2001, *op.cit.*, hal. 220-221.

²⁴ Lihat Somjee, A. H., *op.cit.*, hal. 110.

umum berlatar belakang pendidikan “Barat”. Seperti kata Myron Weiner “Orang-orang Inggris yakin bahwa sistem pendidikan itu harus diarahkan untuk menciptakan suatu kelas baru di Asia Selatan yang paham akan kehidupan intelektual barat, yang dapat menerima dan meyakini gagasan dan lembaga-lembaga Barat”.²⁵ Dengan memahami filosofi pendidikan seperti ini, tidaklah sesuatu yang aneh jika para pendiri India kemudian mempunyai kesadaran untuk melanjutkan sistem pemerintahan yang ditinggalkan Inggris.

“Keberhasilan” Inggris dalam menancapkan pengaruh demokrasi di India melahirkan India merdeka dengan sistem politik “lama”. Proses transformasi demokrasi pun telah berjalan “mulus”. Tidak banyak hambatan besar dari kalangan intelektual maupun dari kelas bawah. Karena itu bagi Dahl masih diperlukan uraian lebih lanjut untuk menambahkan penjelasan bahwa pada akhirnya demokrasi India bertahan karena beberapa kondisi yang menguntungkan.

Faktor yang keempat ini merupakan bagian penjelasan itu. Dahl menjelaskan bahwa kemungkinan untuk terjadinya pengambilalihan dari kelompok anti demokrasi sangat kecil karena; (1).kelompok ini merupakan kelompok yang tidak terkonsentrasi/tersebar; (2). Kelompok ini merupakan kelompok yang mudah terpecah karena merupakan kelompok aliansi suku/kebudayaan; (3).kelompok mayoritas yang mendukung demokrasi (yang beragama Hindu) jumlahnya terlalu besar (mencapai kira-kira 80%).²⁶ Dahl sangat yakin bahwa federalisme telah memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan demokrasi di India.

Sebagai “penutupnya” tentang analisis perkembangan demokrasi di India, Dahl menuliskan “disebuah negara yang tidak memiliki

satu atau beberapa dari lima kondisi yang baik bagi demokrasi, demokrasi bersifat untung-untungan walau bukan tidak mungkin”.²⁷ Ini bisa ditafsirkan –walau terkesan agak berlebihan- sebagai rasa “frustasi” Dahl tentang perkembangan demokrasi India yang susah sekali memasuki tahap demokrasi substansial.

Demokrasi di India memang sering “bungkam” dengan banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada. Apalagi dalam catatan Merkel sejak tahun 1980-an tidak terjadi perubahan secara signifikan terhadap bentuk demokrasi di India. Meski penilaian ini bukanlah penilaian yang berasal dari Dahl tetapi sebagai ilmuwan yang memahami persoalan demokrasi di India, Robert Dahl tentu punya alasan yang tidak terlalu jauh berbeda dengan Merkel dalam menuliskan kalimat terakhirnya hal tersebut.

Demokrasi India: Persentuhan Teoritis

Oleh Dahl yang pertama-tama dijelaskan adalah adanya faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proses transisi di India. Transisi ini menjadi penting karena biasanya ketika kemerdekaan dari pemerintahan kolonial diraih, banyak sekali negara-negara yang meragukan sistem pemerintahan yang lama. Karenanya kalau tanpa penjelasan ini, agak sukar untuk berangkat lebih jauh untuk menjelaskan mengapa selanjutnya demokrasi itu tetap bertahan di India.

Tanggapan yang perlu dikemukakan atas teori “warisan kolonial” Dahl adalah; Pertama, faktor ketidaksengajaan pemerintah kolonial dalam memberikan imej yang baik terhadap demokrasi adalah faktor yang tidak berdiri sendiri. Faktor ini tidak banyak menjelaskan

²⁵ Weiner, *op.cit.*, hal. 151. Weiner menuliskan bahwa “pembentukan Universitas-Universitas di Calcutta, Madras dan Bombay merupakan titik-titik dalam perkembangan politik India. Dari sana muncul suatu kelas sosial baru berpendidikan Barat, berbicara dalam bahasa Inggris dan menganut paham-faham liberal dari penulis-penulis abad ke-19 yang dibacanya di dalam dan diluar universitas”.

²⁶ Dahl, 2001, *op.cit.*, hal. 220-222.

²⁷ *Ibid.*, hal. 223. Dahl mengatakan “walaupun kehidupan politik di India sangat bergolak dan keras, bagaimanapun lembaga-lembaga demokratis dasarnya, beserta kecacatannya, terus berlangsung. Pengamatan ini tampaknya mengacaukan seluruh harapan yang masuk akal. Bagaimana kita dapat mempertanggungjawabkannya? Apakah jawaban dari teka-teki India ini, pastilah sifatnya sementara. Namun walau tampaknya mengejutkan, beberapa aspek khusus di India menjelaskan mengapa India tetap mempertahankan lembaga-lembaga demokratisnya”.

mengapa elit mau menerima demokrasi itu. Kalaupun dikatakan karena faktor ideologis maka penjelasan ini masih menyisakan kebingungan baru, yakni; seharusnya demokrasi tidak mengalami “stagnasi”. Pertanyaannya adalah mengapa kebalikannya yang terjadi; demokrasi yang berkembang hanya model “demokrasi *permissive*”.

Faktor kenyamanan elit harusnya memberikan satu kemungkinan yang lain yang bisa membantu menjelaskan hal itu. Indikasinya pernah muncul dalam pandangan Sorensen yang mengatakan bahwa kebijakan pembangunan di India hanya menguntungkan kelompok tertentu saja.²⁸ Jika pandangan ini benar ini bisa berarti bahwa penerimaan demokrasi itu muncul bersamaan dengan bertemunya kepentingan elit dengan beberapa porsi keuntungan yang dapat dinikmati ketika demokrasi diterapkan. Konsekuensi dan buktinya adalah tentang demokrasi di India yang malah melahirkan kalangan borjuis²⁹. Berikutnya, lepas dari masalah kepentingan elit dengan demokrasi tersebut ada hal lain yang bisa kita kupas dari penjelasan Dahl. Dahl pernah mengatakan bahwa ketika partisipasi meningkat mendahului transformasi politik maka besar kemungkinan demokrasi akan mengalami kegagalan. Hanya disayangkan sekali bahwa tidak ada penjelasan Dahl tentang hal ini pada kasus India. Pertanyaannya adalah bagaimana menjelaskan tingkat keseimbangan partisipasi dengan transformasi demokrasi itu di India.

²⁸ Sorensen, *op.cit.*, hal. 132-133. mereka yang diuntungkan tersebut adalah; (1).borjuis India, (2).petani-petani kaya; (3).birokrasi.

²⁹ Apa yang terjadi di India telah membalikkan teori Barrington Moore Jr. Menurut Moore demokrasi itu kreasi kalangan borjuis di negara Barat. Tetapi kalau kita mengandalkan data yang pernah dikemukakan di Harian Umum Kompas, terlihat bahwa demokrasi di India itu telah melahirkan kaum borjuis. Ini artinya baik demokrasi dan kaum borjuis adalah dua elemen yang saling mengisi. Coba lihat data yang ada pada Harian Umum Kompas tanggal 7 Desember 2006. Lihat tabel dalam kolom “Orang-Orang Kaya India”, *Harian Umum Kompas* (7 Desember 2006), hal. 37. Tentang teori Moore, baca Barrington Moore Jr., *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in Making of the Modern World*, (Boston: Beacon Press, 1966).

Sebenarnya ditingkatan kelas bawah masih perlu sebuah penjelasan bahwa kasta punya peran memberi jalan keberlangsungan demokrasi di India. Kastalah yang memiliki peran besar dalam menciptakan keseimbangan partisipasi dalam masa transformasi itu. Namun argumen ini jarang muncul karena kasta sering dianggap tidak menguntungkan demokrasi. Problem lanjutannya adalah bagaimana mungkin menjelaskan peranan kasta terhadap transisi demokrasi.

Kalau kita merujuk pada pendapat Mohtar Mas’oed maka peranan kasta itu terlihat penting ketika proses transisi terjadi. Lebih-lebih ketika sebelum transisi terjadi atau tepatnya ketika ada usaha negara kolonial untuk memisahkan kelas pemilik tanah, kelas komersial dan profesional kota. Pemisahan ini menjadi lebih mudah karena secara kultural memang sudah ada sekat yang memisahkan kelompok-kelompok dimaksud. Akibatnya para petani tidak segera “berpolitik” ketika ruang partisipasi sudah dibuka. Berikut petikan analisis Mohtar Mas’oed tentang tiga poin penting yang melandasi keberhasilan India mempertahankan demokrasi;

“Pertama, negara kolonial menciptakan kondisi struktural yang menguntungkan bagi pertumbuhan demokrasi parlementer dengan cara memisahkan kelas atas pemilik tanah dari kelas-kelas komersial dan profesional kota yang baru muncul; kedua, gagasan politik Inggris, termasuk gagasan tentang demokrasi perwakilan, masuk kedalam pikiran anggota kelas komersial dan profesional itu ketika mereka bersekolah; ketiga, ketika kelas-kelas komersial dan profesional ini mulai mempertimbangkan gagasan itu lebih serius dan bahkan membentuk gerakan politik nasionalis untuk mencapai tujuan-tujuan politik, mereka didorong kearah akomodasi dengan kelas petani untuk meninggalkan efektifitas politik mereka”.³⁰

Elit menyadari bahwa sistem kasta India masih dibutuhkan untuk menopang bertahannya demokrasi. Inilah salah satu alasan mengapa elit India jarang sekali berbicara tentang kesetaraan di India. Mahatma Gandhi sendiri sebagai tokoh yang punya kharisma besar, memilih bersikap seperti seorang pemilik kasta terendah dan bersikap “acuh” terhadap keberadaan sistem kasta di India. Kasta ber-

³⁰ Pendapat Suyanto ini dikutip oleh Suyanto. Lihat Suyatno, *Menjelajahi Demokrasi*, (Yogyakarta: Liebe Book Press, 2004), hal. 103.

peran sebagai “jangkar” untuk menahan munculnya apa yang disebut Lerner *revolution of rising frustration*³¹. Selain itu berperan “menstabilkan” masyarakat petani dalam masa-masa dimana sistem politik masih berada pada tahap penyesuaian-penyesuaian.

Ketiga, jika teori Michael C. Desch³² kita gunakan untuk menganalisis bungkamnya militer India terhadap politik, maka satu-satunya alasan mengapa perwira militer India tidak melakukan sikap itu adalah karena masih besarnya ancaman konflik antara India dan Pakistan. Dalam studi yang dilakukan oleh Sunil Dugupta³³ ancaman konflik eksternal terhadap India memang sudah terlihat sejak masa awal kemerdekaan. Selain itu -masih merujuk pada Dugupta-, anggaran militer India ternyata senantiasa mengalami peningkatan.

Pendapat yang lemah tapi cukup penting dikemukakan adalah bahwa militer India menyadari politik India merupakan sesuatu yang kompleks, terutama karena sangat rawan dengan konflik. Dengan memberikan kekuasaan secara politik secara formal kepada sipil, maka itu artinya militer mengamankan dirinya agar terhindar dari seranganserangan besar berupa tuduhan pelanggaran HAM yang berat³⁴. Pilihan ini tidak lebih dari sebuah

pilihan strategis ketimbang sesuatu pilihan yang “built in” (pilihan yang muncul karena kesadaran –dalam *mind set* -militer tentang posisinya dibawah supremasi sipil).

Peranan negara besar seperti Amerika sebagai mitra, ancaman, musuh sekaligus “pengawal persaingan” yang penting menghadapi konflik dengan Pakistan menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam “mengontrol” psikologis militer India untuk memilih berpolitik atau tidak. Besar kemungkinan politik luar negeri india yang dikenal sangat “low profile” menjadi salah satu pertimbangan lain bagi militer untuk tetap tidak bergerak terlalu jauh dari “barak”. Faktor-faktor yang saling mengisi ini memperkecil munculnya peluang keinginan militer untuk “maju” sebagai aktor politik yang penting di India.

Keempat, memang benar bahwa terdapat peranan dari sistem federalisme terhadap bertahannya demokrasi di India. Tetapi mengungkapkan faktor ini tanpa dibarengi dengan analisis yang punya penekanan kuat pada faktor federalisme merupakan sesuatu tidak lengkap. Kelemahan terbesar studi Dahl adalah usahanya yang terlalu berlebihan karena ingin menjelaskan sesuatu yang kompleks dengan uraian yang amat singkat dan padat. Meletakkan persoalan demokrasi India dalam satu lingkup persoalan serta banyak mengabaikan keberadaan negara-negara bagian sama artinya menutup besarnya keanekaragaman dan warna-warni politik yang ada di India.

Pernah dikemukakan oleh Larry Diamond dalam bukunya *Developing Democracy Toward Consolidation* bahwa tingkat demokrasi India sangatlah bervariasi tergantung wilayah-wilayah yang ingin dilihat berdasarkan batas-batas teritorialnya. Dan memang sulit membantah kenyataan kalau di India “negara-negara bagian Karnataka, Kerala, Gujarat, dan Bengal Barat jauh lebih demokratis dari segi tingkat kebebasan dibanding negara-negara bagian Uttar Pradesh, Madhya Pradesh

³¹ Istilah ini merupakan istilah yang dipergunakan Lerner untuk menjelaskan efek samping dari modernisasi. Sikap tersebut bisa muncul apabila harapan yang digantungkan masyarakat terlalu tinggi sementara perubahan berjalan lambat. Pendeknya apabila muncul rasa ketidakpuasan terhadap pembangunan. Lihat Daniel Lerner, *Memudarnya Masyarakat Tradisional*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983), hal. 45-47.

³² Baca Michael C. Desch, *Politisi vs Jenderal*, terj. Tri Wobowo Budisantoso, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

³³ Lihat Sunil Dugupta, “India: The New Militaries”, dalam Mutiah Alagappa (ed), *Coercion and Governance*, (Stanford-California: Stanford University Press, 2001), hal. 94-95.

³⁴ Menurut laporan *Federation Internationale des Liges des Droits de l’Home*, (FIDH) Paris, Mei 1993, tindakan brutal tentara India di Khasmir melanggar aturan internasional HAM. Seperti yang disebut dalam Artikel 5 Deklarasi HAM, Ar-tikel 6 dan 7 dari *The International Covenant on Civil and Political Right*, dan Artikel 3 pada Kon-vensi Genewa tahun 1949. Lihat Jusar Hidayat (ed.), *Khasmir, Teror & Pelanggaran*

Hak Asasi: Laporan Berbagai Lembaga Internasional tentang Pelanggaran HAM oleh Tentara India di Khas-mir, (Jakarta: CV. Cahaya Ilmu, 1994).

dan Bihar”³⁵. Konsekuensinya adalah mengecilnya keakuratan yang melekat pada analisis tunggal yang telah dihasilkan ketika saran dari Diamond ini telah diabaikan.

Kesan ini memang akan sangat “menganjal” bagi kalangan ilmuwan politik yang telah menganalisis India. Namun pendapat-pendapat umum yang dihasilkan dari studi-studi yang “tidak lengkap” tidaklah terlalu buruk untuk tetap dilakukan selama tidak mengandung generalisasi berlebihan. Tetap ada tema-tema umum yang cukup dilakukan secara sederhana dan tidak terlalu memerlukan penyebaran analisis.

Kembali pada tanggapan atas analisis Dahl. Telah dikemukakan bahwa kecil sekali kemungkinan terjadinya pengambilalihan kekuasaan oleh kelompok anti demokrasi di India. Tentu ini merupakan sesuatu yang menarik. Alasannya karena masalah ini merupakan alasan yang selalu kontroversial. Seringkali masalah menjadi memburuk manakala pemerintahan demokrasi tidak menerima kenyataan bahwa ada kelompok yang tidak puas dengan cara pemerintahan yang ada.

Studi Neil J. Mitchel melihat bahwa memang ada kecenderungan berkurangnya perlindungan terhadap HAM di India meskipun negara tersebut (India) merupakan negara yang demokratis.³⁶ Ini bukan hal yang mengherankan karena diawal-awalpun sudah banyak literatur yang memberikan informasi tentang masalah HAM di India. Jika ini terus menerus terjadi, maka peningkatan proses pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di India tidak akan pernah berhenti.

Karenanya muncul pertanyaan mengapa kelompok ini tidak segera mengalami perubahan sikap. Padahal kemunculan konflik ini cukup memiliki banyak makna, yakni; (1).Pemerintah demokratis di India tidak diterima oleh sebagian kalangan; (2).Model

“demokrasi *permissive*” India telah menyebabkan sebagian kelompok masyarakat mulai mengalami kekecewaan; (3).Ada kelompok tertentu yang mencari keuntungan dari sisa benturan vertikal tersebut. (4).Kombinasi dari ketiga hal yang telah disebutkan.

Memang benar demokrasi tidak akan dapat hidup tanpa keamanan. Tapi tindakan kekerasan atas nama keamanan sudah terlalu sering dilakukan dan seringkali tidak memberikan hasil yang memuaskan. Mereka yang anti demokrasi berhadapan dengan sikap represif militer dan seringkali sikap ini dibalas dengan kekerasan pula. Tak pelak, pada akhirnya kekerasanpun diklaim diperlukan demi demokrasi itu sendiri. Akibatnya antara demokrasi dan pelanggaran HAM sulit dipisahkan di India.

Kita dapat mengatakan bahwa inilah ambiguitas yang ada di India. Kalau boleh dikatakan “ambiguitas” itu justru merupakan “rahasia” di balik kesuksesan India mempertahankan demokrasi dalam waktu yang panjang. Terlalu banyak hal yang menjadi penopang sekaligus elemen pengancam keberadaan demokrasi. Kesemuanya terlihat “bersikut-sikutan” meski saling “bergandengan tangan” sambil tetap mengantarkan kepastian demokrasi di India, yakni: sebuah “demokrasi *permissive*”.

Penutup

Demokrasi di negeri miskin adalah suatu keniscayaan. Namun meski merupakan keniscayaan Dahl melihat fenomena demokrasi di India sebagai sesuatu yang memungkinkan terjadi. Begitu juga dinegara-negara berkembang lainnya. Kemunculan dan bertahannya demokrasi di India sesuatu yang bisa dijelaskan, karena dalam setiap negara selalu ada faktor-faktor yang mendukung dan tidak mendukung demokrasi itu. Permasalahan dan penjelasannya justru terletak pada faktor mana yang lebih dominan dan tidak dominan, serta sejauhmana faktor-faktor lain yang ada menjalin relasi dengan faktor-faktor tersebut. Menurut Dahl kemunculan dan bertahannya demokrasi itu (di India) sebagai manifestasi dari empat hal penting; pertama, kepercayaan masyarakat India (terutama elit) terhadap demokrasi itu; kedua, kuatnya budaya supremasi sipil dikalangan militer India; ketiga, peranan dari elit kemerdekaan yang tidak anti de-

³⁵ Larry Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation*, (Yogyakarta: IRE Press, 2003), hal. 18.

³⁶ Lihat Neil J. Mitchell (dkk.), “Comparing Nations and States: Human Right and Democracy in India”, dalam *Comparative Political Studies* 8 (Vol. 39, SAGE Publication, 2006), hal. 996-1018.

mokrasi; keempat, kecilnya kemungkinan kelompok anti demokrasi dalam mengambil kekuasaan, lebih-lebih dalam sebuah negara federal. Begitupaun pandangan Dahl ini masih membutuhkan beberapa penjelasan tambahan. Meski tidak ada konsep yang tunggal –bahkan Dahl sendiri tidak memiliki konsepsi khusus meski sempat juga menyinggung tentang “demokrasi cacat”- tentang demokrasi India, tetapi model “demokrasi *permissive*” merupakan tawaran konsep yang baru yang bisa dikaji dan digunakan lebih jauh untuk melihat model demokrasi India. Model demokrasi ini lebih mampu mewakili fenomena dimana demokrasi, sistem kasta, pelanggaran HAM dan kemiskinan terlihat hidup serasi dan hidup berdampingan. Sistem kasta bahkan telah berperan sebagai “fondasi” penting transisi demokrasi di India dan pelanggaran HAM masih tetap merupakan masalah yang pelik. Tentu saja hal ini menjadi semakin menarik untuk dikaji. Ditengah-tengah kosongnya kenyataan bahwa tidak ada negara miskin selain India yang demokratis, muncul sebuah hipotesis: -“jangan-jangan inilah model demokrasi yang paling memungkinkan di negara termiskin”. Karena demokrasi memang bisa berkembang di negara miskin, maka hasilnya bukan demokrasi dalam artian yang sebenarnya. Negara miskin tetaplah susah untuk mencapai tahap demokrasi yang mapan. Kalaupun dikatakan merupakan temuan yang aneh, tetapi memang ada kesan kalau temuan ini muncul sebagai anti thesis teori-teori demokrasi dinegara miskin yang ada sebelumnya. Sebab itu, sekali lagi dikatakan kalau perlu kajian lebih lanjut untuk mempertanyakan kembali apakah temuan ini memang tepat. Yang jelas amatlah sulit untuk bicara demokrasi tanpa “kesejahteraan” ekonomi. Salah satu kasus, misalnya; bagaimana mungkin reformasi terhadap kepolisian India yang sangat “korup” dapat dilakukan secara maksimal, jika -sering disinggung misalnya oleh David H. Bayley³⁷- penyebabnya adalah; (1).gaji yang rendah; (2).waktu kerja yang panjang; (3).lingkungan sosial yang diliputi kemiskinan; (4).pengangguran yang tinggi serta dalam keadaan masyarakat yang

³⁷ Dikutip oleh Hardgrave, *op.cit.*, hal. 227. Lebih lengkap, lihat David H. Bayley, “The Police and Political Order in India”, *Asian Survey* 23 (April 1983), hal. 484-496. Juga lihat David B. Bayley, *The Police and Political Development in India*, (Princeton N.J.: Princeton University Press, 1969.

serba kekurangan logistik. Padahal tanpa reformasi terhadap kepolisian akan sulit bicara penegakan hukum yang adil sebagai cita-cita demokrasi yang sebenarnya. Begitu juga dalam aspek-aspek yang lain.^

Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis yang dikembangkan dari paper penulis pada diskusi kelas tutorial matakuliah *Demokrasi dan Demokratisasi* Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di Jakarta -Salemba- tanggal 1 Mei 2007. Mata kuliah ini diisi oleh Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA dan Dr. Isbodroini Suyanto, MA, serta Panji Anugrah, SIP, M.Si sebagai Tutor. Secara umum Penulis berterima-kasih atas segala masukan dan kritikan terhadap kelemahan Paper ini sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, Robert A. 1992. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya: Jilid II*. terj. A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. terj. A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____.2005. “What Political Institutions Does Large-Scale Democracy Require”. *Political Science Quarterly* 2, (Volume 120, Summer).
- Desch, Michael C. 2002. *Politisi vs Jenderal*. terj. Tri Wobowo Budisantoso. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Diamond, Larry. 2003. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press.
- Dusgupta, Sunil. “India: The New Militaries”. Mutiah Alagappa (ed.). 2001. *Coercion and Governance*. Stanford-California: Stanford University Press.
- Fatah, Eep Saefullah. 2000. *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orba*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hardgrave Jr., Robert L. (dkk.). 2000. *India: Government and Politics in a Developing Nation*. New York: Harcourt College Publisher.
- Hidayat, Jusar (ed.). 1994. *Khasmir, Teror & Pelanggaran Hak Asasi: Laporan Berbagai Lembaga Internasional tentang Pelanggaran HAM oleh Tentara India di Khasmir*. Jakarta: CV Cahaya Ilmu.

- Huntington, Samuel P. 1997. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Lerner, Daniel. 1983. *Memudarnya Masyarakat Tradisional*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Linz, Juan J. "Demokrasi, Multinasionalisme, dan Federalisme". Ikrar Nusa Bhakti (ed.)(dkk.). 2001. *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Macridis, Roy C. 1992. *Perbandingan Politik: Catatan dan Bacaan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Merkel, Wolfgang. 2005. *Demokrasi di Asia*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Mitchell, Neil J. (dkk). 2006. "Comparing Nations and States: Human Right and Democracy in India". *Comparative Political Studies* 8 (Volume 39, No. 8. SAGE Publication).
- Moore Jr., Barrington. 1966. *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in Making of the Modern World*. Boston: Beacon Press.
- "Orang-Orang Kaya India", 2006. *Harian Umum Kompas*, (7 Desember).
- Weiner, Myron, "Politik Asia Selatan". Muhaimin, Yahya (ed.). 1978. *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Snyder, Jack. 2003. *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah*. Jakarta: Kepustakaan Gramdia Populer.
- Somjee, A. H. "Western Democratic Theories and Non-Western Democratic Experiences: India". Wiarda, Howard J. 2004. *Comparative Democracy and Democratization*. USA: Wadsworth Group.
- Sorensen, Georg. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Stern, Robert W. 2003. *Changing India: Bourgeois Revolution on the Subcontinent*. New York: Cambridge University Press.
- Suyatno. 2004. *Menjelajahi Demokrasi*. Yogyakarta: Liebe Book Press.
- Weisskopf, Thomas E. *Ketergantungan dan Imperialisme di India*, dalam Andrew Blowers (dkk.). 1983. *Ketidakterataan, Konflik dan Perubahan*. terj. Paul Sihotang. Penerbit Universitas Indonesia.